



RENJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Ir. Soekarno – G. Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Pemko Palangka Raya
Telepon/Fax. (0536-3221219-Email/surel : dishub@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 1517 / DISHUB.I / X / 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
- KESATU : Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA : RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan

Perangkat Daerah (RKAP–PD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19621024 198603 1 018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
BAB I P E N D A H U L U A N.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD	21
2.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	25
2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD	29
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	30
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	30
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	31
3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	31
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD.....	31
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V P E N U T U P.....	36

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2018–2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan transportasi selama periode 2018–2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan transportasi. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2022). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan pada akhir tahun anggaran 2022.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan pada sektor transportasi Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19621024 198603 1 018

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SOPD berkewajiban menyusun Renja-SOPD yang ditetapkan oleh kepala SOPD. Rancangan Renja-SOPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SOPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SOPD juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SOPD dibahas dalam forum SOPD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SOPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022. RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”** Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun misi termasuk yang dimaksud adalah Misi Pertama **“Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)”** dimana bagian Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya bertujuan untuk **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi”**

dengan Tujuan **(M1S3)**.

1.Meningkatkan Kualitas infrastruktur

dengan Sasaran 1 Pembangunan yaitu:

1.Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 , akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 712);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06);
31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
32. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
33. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);
34. DPPA-SOPD Nomor 188.45/220/2020 Tanggal 24 April 2020 pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
35. Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Transportasi Kota Palangka Raya yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 adalah :

1. Acuan Dinas Perhubungan dalam mengoperasionalkan RKPD dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota;

2. Merumuskan program dan kegiatan sektor pembangunan transportasi perkotaan Kota Palangka Raya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Transportasi selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor transportasi perkotaan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SOPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SOPD

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2022. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2021) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i> Formula: $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➤ Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah ➤ Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ➤ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ➤ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ➤ Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ➤ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ➤ Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ➤ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ➤ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha ➤ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Visi dan Misi. Yang pada tahun 2021 melaksanakan sasaran dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi target pada tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAHSAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	
		(Rp)	(Rp)	%	
I	Belanja Modal	5.921.059.671,00	5.872.885.493,45	99,19	
II	Belanja Operasi	13.128.769.957,00	12.517.882.226,00	95,35	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.930.117.888,00	11.214.419.148,00	94,95	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.546.345.000,00	6.009.852.371,45	99,11	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	109.980.000,00	1.166.496.200,00	99,26	
Jumlah 1 + 2		19.049.829.628,00	18.390.767.719,45	96,54	

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 94,95% dari target awal 100%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program strategis dan nonstrategis ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 99,11% dari target awal 100%

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program strategis dan nonstrategis ini terutama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha. Program ini telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 99,26% dari target awal 100%.

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2021 dialokasikan anggaran total sebesar Rp. 19.049.829.628 dengan realisasi anggaran belanja total sebesar Rp.

18.390.767.719,45 dengan demikian capaian realisasi rencana akhir anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebesar **96,54%**.

Adapun Belanja Modal dialokasikan anggaran Rp. 5.921.059.671,00 dengan realisasi Rp. 5.872.885.493,45 dengan sebesar **99.19%** Sebagian besar anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tersebut dialokasikan pada program dan kegiatan yang bersifat strategis. Meskipun pelaksanaan hampir mencapai 100% akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem kerja maupun cara dan hasil pekerjaan di lapangan sehingga nanti diharapkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan hasil dokumen perencanaan tersebut dapat diimplementasikan dan berdaya guna terhadap masyarakat.

Dengan demikian rata-rata pencapaian akuntabilitas keuangan yang **96,54%** hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan sebagai lembaga teknis daerah sangat baik, dapat dilihat pada lampiran keuangan sebagai berikut:

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2018–2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas–tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Palangka Raya dan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
 - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Palangka Raya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Kepegawaian dan Umum
 - b. Subag Keuangan dan Aset
 - c. Subag Perencanaan dan Evaluasi
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Lalu Lintas.
 - b. Bidang Angkutan dan Sarana.
 - c. Bidang Prasarana.
 - d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman

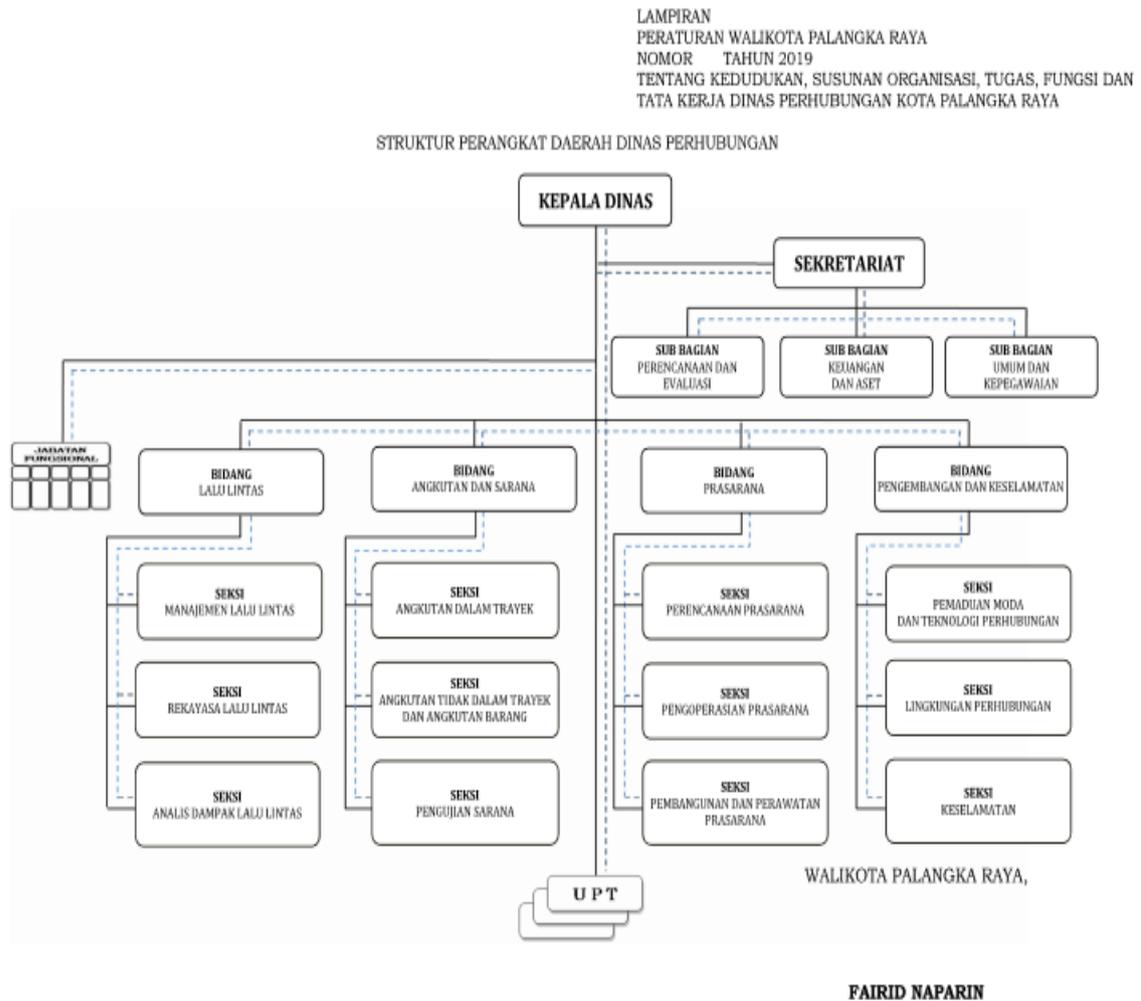
Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda transportasi yang Dilayani pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya



Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang membantu WaliKota Palangka Raya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SOPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kesiapan Dinas Perhubungan Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri 4.0. Transformasi Era Industry 4.0 Adalah Era Cyber-Physical System, Maka Transformasi Menghadapi Era Industri 4.0 Adalah Transformasi Digital Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi KEMENHUB RI Akan Mengimplementasikan:

Sistem Informasi yang Terintegrasi pada Pemerintah Daerah diantaranya : 1. IT Tentang Keselamatan; 2. IT tentang Antar moda; 3. IT tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

SDM Perhubungan di Era 4.0 antara lain: 1. Harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru, teknologi digital 2. Berani meninggalkan proses manual ke proses digital 3. Mulai meninggalkan evaluasi kerja berbasis output (product), menjadi berbasis outcome (impact) Adapun beberapa isu strategis menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Kementerian Perhubungan Darat 2020-2024 dapat menjadi isu strategis bagi Kota Palangka Raya diantaranya:

1. transportasi perkotaan,
2. perubahan iklim/mitigasi bencana,
3. ODOL,
4. SDM
5. Pembagian Kewenangan,
6. Angkutan Sewa Khusus,
7. Pemerataan Pembangunan,
8. Perkembangan IT,
9. Kinerja Pelayanan dan
10. Keselamatan Transportasi Darat;

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terhadap Perkembangan Pembangunan Prasarana Perhubungan di Wilayah Kota Palangka Raya

Perlu adanya Lokasi Khusus untuk Command Center yang terintegrasi dengan ATCS maupun Teknologi Informasi lain yang terbangun pada wilayah Kota Palangka Raya. Tahun 2019 Dinas Kominfo Propinsi Kalteng Akan memasang 40 Titik CCTV yang bersinergi dengan Perhubungan Kota Palangka Raya pada lokasi Persimpangan Rawan Kecelakaan dan beberapa Traffic Light / APILL yang telah terpasang. Dalam melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tentunya selain dengan telah dicapainya indikator-indikator yang ada, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya juga menghadapi berbagai kendala-kendala dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut baik itu dibidang teknis Lalu Lintas, Angkutan dan Sarana, Prasarana, Pengembangan dan Keselamatan adanya banyak isu –isu strategis yang berkembang di masyarakat. Adapun Isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Palangka Raya yaitu antara lain :

Aspek Kajian	Capaian / kondisi saat ini (2016)	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SOPD
			Internal	Eksternal	
Gambaran pelayanan kinerja SOPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	409.927 orang kedatangan dan 415.668 orang keberangkatan	45.000 kedatangan dan keberangkatan penumpang	Area Bandara yang belum memadai dalam menampung angkutan antar jemput penumpang dan parkir	Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan bandara yang lebih luas	Kurangnya angkutan antar jemput bandara laik jalan yang tersedia
	3 buah terminal penumpang dan 0 terminal barang	4 buah terminal penumpang dan 1 terminal barang	Belum adanya sinkronisasi pembangunan antar	Rusaknya sarana prasarana di Kota Palangka Raya yang	Tingginya angka kecelakaan diakibatkan sarana prasarana

			sektoral baik pemerintah pusat, propinsi dan daerah	dilalui oleh angkutan barang	transportasi yang rusak
	Jumlah dermaga rusak 5 dan baik 8	Jumlah dermaga yang diperlukan sebanyak 16 buah di tiap kelurahan	Kurangnya perawatan dan pemeliharaan bangunan prasarana transportasi sungai	Prioritas kegiatan masih tertuju pada pembangunan di daerah pusat kota	Akses transportasi antar kelurahan melalui transportasi sungai belum ada
	Jumlah parkir liar meningkat tidak terpantau dan jumlah parkir resmi 169 pengelola	Jumlah lokasi usaha mempunyai 1 pengelola	Kurangnya pengawasan dan pengendalian juru parkir liar	Kurang tegasnya aparat penegak hukum bagi pelanggaran dan perda	Tidak teratasinya parkir liar di Kota Palangka Raya
	Jumlah 176 kecelakaan	0 kecelakaan	Kurangnya kinerja pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan laik jalan dan mematuhi peraturan	Kurangnya sarana prasarana dan petugas dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas
	Pertumbuhan jumlah kendaraan 1.193.978 unit	Pertumbuhan jumlah kendaraan 1.000.000 unit	Kurangnya jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengendalikan pengguna	Belum diatur secara tegas regulasi mengenai pengendalian produksi dan	Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak seiring dengan jumlah jalan

			a jalan	pemasaran kendaraan pribadi	serta sarana perlengkapan jalan yang memadai
Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	202 sarana moda transportasi dan perlengkapan jalan	1500 sarana moda transportasi dan perlengkapan jalan	Kurangnya jumlah moda transportasi dan perlengkapan jalan	Dukungan prioritas belum tertuju pada pembangunan perlengkapan jalan	Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak seiring dengan jumlah jalan serta sarana perlengkapan jalan yang memadai
					Ketersediaan Angkutan Transportasi menuju lokasi Wisata belum ada dan tidak terjadwal
Kajian Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya terhadap Renstra Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. transportasi perkotaan, 2. perubahan iklim/mitigasi bencana, 3. ODOL, 4. SDM 5. Pemerataan Pembangunan, 6. Perkembangan IT, 7. Kinerja Pelayanan dan 8. Keselamatan Transportasi Darat; 				
Kajian terhadap RTRW	<p>Posisi strategis kota ini tidak terlepas dari posisinya sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemajuan kota akan menjadi barometer bagi kemajuan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Namun demikian, seiring dengan pesatnya pembangunan kota, disaat yang sama terus muncul berbagai persoalan yang menghambat perkembangan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Persoalan itu mulai dari terbatas anggaran pembangunan, lahan dan pembangunan perkantoran, dan persoalan-persoalan kota pada umumnya seperti pelayanan publik, tata ruang kota, pemukiman, persampahan, serta persoalan-persoalan sektoral lainnya seperti ekonomi kota, lingkungan hidup,</p>				

	kependudukan, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, jalan lingkungan, perlindungan sosial, persoalan keamanan dan ketertiban, persoalan penataan kota, dan masalah urban. Secara nasional Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rencana pembangunan rel kereta api dari Palangka Raya – Banjarmasin – Batulicin telah dibuat kajian Kementerian Perhubungan.
--	---

1. Ketersediaan Angkutan Transportasi menuju lokasi Wisata belum ada dan tidak terjadwal.
2. Kurangnya angkutan antar jemput bandara laik jalan yang tersedia.
3. Tingginya angka kecelakaan diakibatkan sarana prasarana transportasi yang rusak.
4. Akses transportasi antar kelurahan melalui transportasi sungai belum ada.
5. Tidak teratasinya parkir liar di Kota Palangka Raya.
6. Kurangnya sarana prasarana dan petugas dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas
7. Rendahnya kualitas SDM perhubungan yang terlatih
8. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak seiring dengan jumlah jalan serta sarana perlengkapan jalan yang memadai

2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Palangka Raya dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pengawasan pembangunan transportasi dengan melibatkan masyarakat /fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022 terlampir telah mempedomani Rancangan Awal RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota Palangka Raya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perhubungan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018–2023. VISI Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menginduk pada Visi Walikota adalah :

**“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun,
Dan Sejahtera Untuk Semua”**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Misi 1	: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment (Lingkungan Cerdas)</i>
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
Sasaran	: Meningkatkan Mobilitas Orang dan Barang
<hr/>	
Sasaran OPD	: Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pengawasan pembangunan transportasi dan membantu WaliKota Palangka Raya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai "*pengarah*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kota Palangka Raya tahun 2018–2023 yaitu "***Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua***" dan sesuai dengan maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2021 terdiri dari :

Program Utama

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).

- a. untuk mewujudkan tersedianya Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat untuk kepentingan pengambilan keputusan.
- b. untuk menata wilayah Angkutan Moda Transportasi Darat agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
- c. untuk mewujudkan perencanaan yang mampu merencanakan tata ruang wilayah, guna mengatasi permasalahan sarana dan prasarana transportasi secara terintegrasi.
- d. untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pengawasan pembangunan Transportasi Darat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- e. untuk mewujudkan tersusunnya kelaikan dan pengawasan keselamatan serta tersusunnya rencana induk pengembangan kendaraan bermotor Transportasi Darat.

- f. untuk mewujudkan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian keselamatan Transportasi Darat.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program ini bertujuan

1. untuk mewujudkan tersedianya Prasarana dan Fasilitas Transportasi Sungai untuk kepentingan pengambilan keputusan.
2. untuk menata wilayah Angkutan Moda Transportasi Sungai agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
3. untuk mewujudkan perencanaan yang mampu merencanakan tata ruang wilayah, guna mengatasi permasalahan sarana dan prasarana Transportasi Sungai secara terintegrasi.
4. untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pengawasan pembangunan Transportasi Sungai yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
5. untuk mewujudkan tersusunnya kelaikan dan pengawasan keselamatan serta tersusunnya rencana induk pengembangan kendaraan bermotor Transportasi Sungai.
6. untuk mewujudkan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian keselamatan Transportasi Sungai.

Program Penunjang

3. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini bertujuan

1. untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
3. untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan lugas santun cepat dan optimal.

4. untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
5. untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan dalam Renja Perubahan 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2019–2020 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, pengawasan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan rencana program dan kegiatan anggaran perubahan tahun 2022 :

Jumlah Program	: 3
Jumlah Kegiatan	: 18
Jumlah Sub Kegiatan	: 41
Pagu Indikatif APBD Perubahan	: Rp. 25.181.442.888
Pagu Indikatif APBN/TP	: - (belum ada bantuan)
Pagu Indikatif APBN/DAK	: - (belum ada bantuan)

Kegiatan terlampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN/DAK, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Terlampir

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) SOPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Palangka Raya, Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199610 1 001

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														22,586,442,888	24,581,442,888		19,277,816,806		
2	1 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														12,930,117,888	13,590,117,888		13,338,816,806		
2	1 5	0 1	2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														87,310,000	87,310,000		125,000,000	
2	1 5	0 1	2.0 1 1	0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	90 %	90 %	30,040,000	30,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	85,000,000	
2	1 5	0 1	2.0 1 6	0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	90 %	90 %	25,250,000	25,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	15,000,000	
2	1 5	0 1	2.0 1 7	0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	32,020,000	32,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	25,000,000	
2	1 5	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														10,536,545,765	10,391,545,765		10,042,816,806
2	1 5	0 1	2.0 2 1	0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	90 %	90 %	5,926,763,390	5,826,763,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	5,492,816,806	
2	1 5	0 1	2.0 2 2	0 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Jumlah Honor Pegawai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	90 %	90 %	4,580,268,000	4,535,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	4,500,000,000	
2	1 5	0 1	2.0 2 7	0 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	90 %	90 %	29,514,375	29,514,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	50,000,000	
2	1 5	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														25,540,000	25,540,000		30,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2510200	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah barang yang diasuransikan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Unit	12 Unit	90 %	90 %	25,540,000	25,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	30,000,000					
25105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										245,638,750	245,638,750				286,000,000						
2510502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	25 stell	25 stell	90 %	90 %	100,638,750	100,638,750		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	186,000,000					
2510509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	9 Orang	9 Orang	90 %	90 %	95,000,000	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	80,000,000					
2510501	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang- undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	300 Orang	300 Orang	90 %	90 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	20,000,000					
25106	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,055,392,275	1,775,392,275				1,395,000,000						
2510601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	9 Item	9 Item	90 %	90 %	19,013,525	19,013,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	20,000,000					
2510602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli Jenis dan Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	45 Jenis 21 Item	45 Jenis 21 Item	90 %	90 %	180,169,250	180,169,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	150,000,000					
2510604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	520 Kotak	4000 Kotak	90 %	90 %	182,725,000	282,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	200,000,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2510205	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 Item	10 Item	90 %	90 %	159,933,500	259,933,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	200,000,000			
2510206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3408 Eksemplar	3408 Eksemplar	90 %	90 %	44,540,000	44,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	25,000,000			
2510209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 kali	12 kali	90 %	90 %	469,011,000	989,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	800,000,000			
2510207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											50,000,000	55,000,000			75,000,000				
2510205	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Unit Jenis	2 Unit Jenis	90 %	90 %	0	0		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	25,000,000			
2510206	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Kebutuhan Peralatan ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	13 unit	13 unit	90 %	90 %	50,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	50,000,000			
2510208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											214,440,998	194,440,998			365,000,000				
2510201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Bahan Surat Menyurat	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1500 Lembar	1500 Lembar	90 %	90 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	15,000,000			
2510202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Rekening yang terbayar	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	36 Bulan/Rekening	36 Bulan/Rekening	90 %	90 %	158,727,748	138,727,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	200,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
25102004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Peralatan Kebersihan yang terbeli	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	20 Jenis	20 Jenis	90 %	90 %	40,713,250	40,713,250		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	150,000,000			
25109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										715,250,100	815,250,100				1,020,000,000				
251092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang di pelihara	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Unit	12 Unit	90 %	90 %	483,230,100	583,230,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	620,000,000			
251096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah perbaikan peralatan dan mesin kantor yang di pelihara	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	39 Unit	39 Unit	90 %	90 %	42,020,000	42,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	50,000,000			
251099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Paket	2 Paket	90 %	90 %	190,000,000	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	350,000,000			
252	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										9,546,345,000	10,581,345,000				5,461,000,000				
25201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										0	0					100,000,000			
25211	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala Kota dengan memperhatikan RTRW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215202002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
215202003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
215202002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										3,117,950,000	3,901,200,000			3,460,000,000			
215202001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Dokumen pendukung angkutan kota dan masal	Berfungsinya Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	220,000,000	
215202002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota	Berfungsinya Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Kegiatan	2 Kegiatan	90 %	90 %	2,892,950,000	3,676,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000,000	
215202003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Level Keselamatan Transportasi	berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal	Berfungsinya Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Lokasi	1 Lokasi	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	160,000,000	
215202004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah perlengkapan jalan yang di pelihara	Berfungsinya Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Lokasi	1 Lokasi	90 %	90 %	225,000,000	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	80,000,000	
215202003	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										32,000,000	32,000,000			295,000,000			
215202001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	5,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
215020302	Pembangunan Gedung Terminal	Level Keselamatan Transportasi	Terbangunnya terminal penumpang	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks		1 Terminal	1 Terminal	90 %	90 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	175,000,000	
215020303	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Level Keselamatan Transportasi	Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Terminal	1 Terminal	90 %	90 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	40,000,000	
215020304	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah terminal yang terpelihara	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90 %	90 %			32,000,000	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	25,000,000	
215020305	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal	Berfungsinya Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Orang	2 Orang	90 %	90 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	50,000,000	
2150204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										132,950,000	132,950,000				5,000,000				
2150204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Fasilitas Perparkiran	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	4 Triwulan	4 Triwulan	90 %	90 %			132,950,000	132,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	5,000,000	
2150205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										5,940,186,000	5,993,186,000				766,000,000				
2150205	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Unit	1 Unit	10299 KIR	10299 KIR			5,500,000,000	5,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	150,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
215202	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	12 Bulan	12 Bulan	10299 KIR	10299 KIR	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000			
215203	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	12 Bulan	12 Bulan	10299 KIR	10299 KIR	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	12,500,000			
215204	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	4000 set	4000 set	10299 KIR	10299 KIR	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	200,000,000			
215205	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Buah	1 Buah	10299 KIR	10299 KIR	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	25,000,000			
215206	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Identifikasi dan Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	12 Bulan	12 Bulan	10299 KIR	10299 KIR	0	0		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	22,500,000			
215207	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Alat Uji dipelihara	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	11 Item	11 Item	10299 KIR	10299 KIR	305,086,000	358,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	300,000,000			
215208	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10299 KIR	10299 KIR	35,100,000	35,100,000		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	30,000,000			
215209	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	10 Bulan	10 Bulan	10299 KIR	10299 KIR	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21520201	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KIR Angkutan Umum/ Kendaraan Bermotor	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Bulan	1 Bulan	10299 KIR	10299 KIR	0	0		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000			
21520206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										157,011,750	157,011,750				334,000,000				
21520261	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Agenda	2 Agenda	90 %	90 %	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000			
21520262	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Level Keselamatan Transportasi	tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	5 Bulan	5 Bulan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	300,000,000			
21520263	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	5 Bulan	5 Bulan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000			
21520264	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90 %	90 %	122,011,750	122,011,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	4,000,000			
21520207	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										15,000,000	15,000,000				20,000,000				
21520273	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin	Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian Andalalin	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90 %	90 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000			
21520208	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										60,375,000	229,125,000				245,000,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2152081	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan inspektur LLAJ	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Orang	1 Orang	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	5,000,000	
215282	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	4 kegiatan	4 kegiatan	90 %	90 %	0	0		Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000	
215283	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	4 kegiatan	4 kegiatan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000	
215284	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90 %	90 %	20,062,500	20,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	10,000,000	
215285	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan inspeksi dan dan Audit di unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Tercapainya KAMSELTIBCAR Lalu Lintas di Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	40,312,500	209,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	200,000,000	
215209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											90,872,250	120,872,250			26,000,000		
215291	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah kegiatan pendataan Angkutan Umum di Kota Palangka Raya	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	90,872,250	120,872,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	20,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya (laporan)	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Laporan	2 Laporan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	6,000,000	
210211	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0			54,000,000		
210211	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	50,000,000	
210212	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	3,000,000	
210213	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Level Keselamatan Transportasi	Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan)	Lancarnya Mobilitas Orang dan Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,196 Indeks	0,196 Indeks	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Keselamatan Transportasi	0,196 Indeks	1,000,000	
210212	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0			2,000,000		
210221	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
21522.102	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														1,000,000
21522.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												0	0				1,000,000	
21523.103	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														1,000,000
21524.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												0	0				150,000,000	
21524.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														50,000,000
21524.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														100,000,000
21526.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												0	0				3,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
2150262	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000	
2150263	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	
21503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													109,980,000	409,980,000			478,000,000	
2150303	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha													20,000,000	20,000,000				25,000,000
21503031	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen)		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210205302	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan)					2 Kegiatan	2 Kegiatan			20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
210205304	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota										0	0				1,000,000		
210205304	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000		
210205305	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha										0	0				10,000,000		
210205305	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000		
210205307	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0				16,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215371	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
215372	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	
215308	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal											0	0			1,000,000		
215382	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang			90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	1,000,000	
215309	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											0	0			15,000,000		
215391	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215392	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen)	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000	
215393	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	2 kegiatan	2 kegiatan	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	5,000,000	
215311	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau											0	0	60,000,000				
215311	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000	
215312	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 kegiatan	1 kegiatan	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215313	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	4 triwulan	4 triwulan	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	20,000,000	
215313	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											89,980,000	389,980,000		350,000,000			
215331	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah dokumen kebutuhan persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 kegiatan	1 kegiatan	90 persen	90 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000	
215332	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Dokumen Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 kegiatan	1 Dokumen	90 persen	90 persen	0	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	200,000,000	
215333	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang diperlihara dan dioperasionalkan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	20 Dermaga	20 Dermaga	90 persen	90 persen	69,960,000	219,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000	
215334	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54153 Orang	54153 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90 persen	90 persen	20,020,000	20,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	50,000,000	
TOTAL												22,586,442,888	24,581,442,888		19,277,816,806			